PELAYANAN SOSIAL PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Farrelia Azzahra¹, Rudi Saprudin Darwis²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

Article history
Received : 2023-08-06
Revised : 2023-08-09
Accepted : 2023-08-10

*Corresponding author :
farrelia19001@mail.unpad.ac.id,
rudi.darwis@unpad.ac.id

No. doi: 10.24198/focus.v6i1.49010

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan hal mengejutkan yang dilakukan manusia. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentunya akan menimbulkan rasa traumatis yang akan terus mempengaruhi kehidupan selanjutnya apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Terdapat tiga dampak yang dialami oleh anak korban kekerasan. Ketiga dampak tersebut adalah Dampak Terhadap Fisik, Dampak Terhadap Mental, dan Dampak terhadap Sosial. Korban kekerasan seksual cenderung akan mengalami disfungsi sosial. Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengembalikan keberfungsian sosial anak korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang mana menggunakan referensi buku, artikel, berita, data sekunder, penelitian terdahulu sebagai sumber penelitian penulis. Hasil dari penelitian ini adalah peran sosial seorang individu dalam melaksanakan tugas kehidupannya sangat erat kaitannya dengan keberfungsian sosial. Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan perempuan dan anak serta untuk memberikan perlindungan, pelayanan sosial dilakukan oleh lembaga P2TP2A melalui program rehabilitasi sosial yang dilakukannya. P2TP2A mengeluarkan tiga layanan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Layanan Rehabilitas Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, Anak, Pelayanan sosial, Keberfungsian sosial.

SOCIAL SERVICES AT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) IN ACHING SOCIAL FUNCTIONALITY OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

ABSTRACT

Sexual violence is a cruel thing that humans do. Sexual violence that occurs in children will certainly cause a traumatic feeling that will continue to affect the next life if it is not handled quickly and appropriately. There are three impacts experienced by child victims of violence. The three impacts are Physical Impact, Mental Impact, and Social Impact. Victims of sexual violence tend to experience social dysfunction. This study discusses how the form of social services provided by the Women and Children

Empowerment Service Center (P2TP2A) in restoring the social functioning of children victims of sexual violence. The writing method used is literature study. Literature study is a research method which uses reference books, articles, news, secondary data, and previous research as sources for the author's research. The result of this research is that the social role of an individual in carrying out his life tasks is closely related to social functioning. In order to fulfill the rights and needs of women and children as well as to provide protection, social services are carried out by P2TP2A institutions through their social rehabilitation programs. P2TP2A issued three services in handling cases of sexual violence against children. Social Rehabilitation, Repatriation, and Social Reintegration Services.

Keywords: *Sexual violence, Children, Social services, Social function.*

PENDAHULUAN

Keberfungsian sosial merupakan ekspresi interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya. Keberfungsian sosial merupakan hasil atau produk dari aktivitas orang dalam berelasi dengan sekelilingnya. Dijelaskan oleh Zastrow (1982) bahwa manusia senantiasa hidup dalam berbagai sistem, seperti sistem keluarga, pelayanan sosial, politik, pekerjaan, keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Interaksi orang dengan sistem-sistem tersebut mempengaruhi tingkat keberfungsian sosial mereka. Dalam hal ini interaksi yang kondusif akan menyebabkan orang mampu memenuhi kebutuhan, melaksanakan tugas, dan mencapai tujuan hidup. Namun sebaliknya, jika interaksinya kurang baik akan menyebabkan orang tersebut mengalami masalah.

Sedangkan Siporin (1975) menyatakan bahwa keberfungsian sosial merupakan suatu cara yang menggambarkan perilaku orang. Cara atau perilaku tersebut dilakukan oleh individu, keluarga, organisasi maupun masyarakat. Dalam konteks yang demikian, kelompok perempuan rentan merupakan orang yang mengalami masalah dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya.

Kekerasan seksual merupakan hal sangat keji yang dilakukan oleh seorang

manusia. Menurut (WHO, 2017) kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Dilansir dari liputan6.com, Kementerian Sosial merilis laporan resmi pada Senin (7/3/2022) tentang jumlah anak perempuan yang hamil akibat kekerasan seksual mencapai 780 anak. Pihak Kemensos mengaku saat ini sedang menangani ratusan anak yang mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual. Data Kemensos per 6 Januari 2022, jumlah anak hamil akibat kekerasan seksual yang telah ditangani oleh Kemensos sebanyak 780 anak dengan rincian, 568 orang sudah melahirkan dan 212 belum melahirkan. Ini merupakan berita miris yang benar-benar terjadi di negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang RI No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 1 ayat 1, mengatakan bahwasannya anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibu. Semua anak memiliki hak yang sama tanpa memandang kondisi ekonomi, sosial, ras serta latar belakang lainnya. Perlindungan terhadap anak adalah

segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka. Anak harus memperoleh perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Menurut KOMNAS, Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali dibungkam.

Menurut (Sadarjoen, 2005) bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut :

1. Untuk tujuan obyek seksual
 - a. Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
 - b. Incest
 - c. Hiperseksualitas
 - d. Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.

2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a. Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi
 - b. Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
3. Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

Korban sering merasa tidak berdaya, dengan memberinya pelukan hangat diharapkan dapat menyadarkan korban bahwa ia tidak sendirian. Dengan pelukan sedikit banyak dapat diartikan bahwa kita menghargai korban, yang memiliki dampak besar terhadap pemulihan perasaan pengandilian diri korban. 95% korban pemerkosaan mengalami PTSD (*Post Traumatic Disorder*) Dukungan bagi korban sangat dibutuhkan untuk melewati masa traumatiknya.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan di Undang-Undang tersebut, maka setiap orang yang memberikan pengasuhan memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak-anak. Namun mirisnya, masih ada banyak anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekatnya maupun orang lain yang tidak bertanggung jawab. Keadaan tersebut membuktikan bahwa masih ada pihak yang tidak menjalankan tugas dan perannya dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia. Dengan terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak tersebut masih banyak anak yang hak nya tidak terpenuhi. Dalam laporan bertajuk Laporan Status

Global tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020 terungkap 88 persen atau hampir semua negara di dunia telah memiliki undang-undang perlindungan anak dari kekerasan. Namun, hanya kurang dari separuhnya atau 47 persen negara yang mengatakan penegakan hukum telah dijalankan.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentunya akan menimbulkan rasa traumatis yang akan terus mempengaruhi kehidupan selanjutnya apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Menurut Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) dampak trauma dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Melihat dampak yang diberikan cukup besar dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial korban, hal ini tentunya akan berpengaruh juga pada keberfungsian sosial anak tersebut. Keberfungsian sosial sendiri menurut (Soeharto, 2014) adalah kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/ merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shock and stresses*). Maka dari itu, keberfungsian sosial akan selalu berhubungan dengan bagaimana seorang individu (anak itu sendiri) dalam, memenuhi kebutuhan hidupnya, menyelesaikan, dan menjalankan tugas-tugas nya. Bila keberfungsian sosialnya terganggu, bagaimana mengembalikan keberfungsian sosialnya. Selain itu, anak korban kekerasan seksual juga merupakan kelompok rentan yang mana hak serta kebutuhannya perlu dilindungi dan dibantu dalam pemenuhannya.

P2TP2A mempunyai salah satu program yang di namakan dengan Pusat Pemulihan Trauma (*trauma center*), dimana Pusat Pemulihan Trauma ini bertujuan untuk menghapuskan trauma psikologis korban agar kedepannya korban dapat tetap menjalankan hidupnya dan dapat beraktifitas seperti biasanya.

Meskipun pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada Anak Korban bersifat fisik maupun psikis, akan tetapi akibat yang bersifat psikis cenderung lebih lama untuk dipulihkan, sehingga pemulihan trauma psikologis terhadap korban ini sangatlah penting. Hal ini dapat membantu memulihkan keadaan psikis dan psikososial Anak Korban sehingga dapat melanjutkan kehidupannya kembali dan mengembalikan fungsi sosial mereka serta hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinankemungkinan pada korban, khususnya Anak Korban, untuk tidak menjadi seorang predator di kemudian hari karena akibat dari trauma yang pernah dialaminya.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan perempuan dan anak serta untuk memberikan perlindungan, Departemen Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, membentuk lembaga khusus untuk memberi pelayanan kepada perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pembentukan P2TP2A bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelayanan

sosial yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak.

METODE

Metode penulisan pada artikel ini menggunakan, studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sumber lainnya (Mardalis, 1999). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari beberapa buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan dikaji (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan juga merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak sebagai korban kekerasan seksual perlu mendapatkan pelayanan dalam rangka penyembuhan trauma yang dideritanya. Pelayanan tersebut diberikan oleh sebuah lembaga yang memiliki wewenang dalam pemberian layanan sosial tersebut. Anak yang mendapatkan tindak kekerasan seksual, akan berdampak pada kondisi fisik dan psikis. Tidak hanya itu, kekerasan seksual yang dirasakan pun akan berdampak pada kondisi sosial sang anak. Kekerasan seksual yang dialami akan menimbulkan rasa traumatis pada diri anak (Kurniawan et al., 2019). Sebagai seorang korban, anak belum mengerti bahwa dirinya adalah korban. Pemahaman dan pikiran yang ada pada anak akan merespon hal tersebut bukan sebagai suatu tindakan yang menjadikan dirinya korban. Hal ini bisa saja membuat anak lebih memilih untuk

diam dan tidak menceritakan apa yang telah pelaku perbuat pada anak tersebut.

Dalam penelitiannya (Manalu., 2006) menyebutkan terdapat tiga dampak yang dialami oleh anak korban kekerasan. Ketiga dampak tersebut adalah Dampak Terhadap Fisik, Dampak Terhadap Mental, dan Dampak terhadap Sosial.

Dampak Terhadap Fisik terjadi apabila anak mengalami kekerasan seksual, hal tersebut menimbulkan pengaruh bagi fisik anak sebagai korban. Anak dapat mengalami keterhambatan dalam pertumbuhan otak dan kerusakan organorgan internal anak, meningkatnya risiko penyakit-penyakit yang berkaitan dengan stres, penurunan nafsu makan, tidak nyaman di daerah sekitar alat kelamin, berisiko untuk tertular penyakit kelamin menular, luka di tubuh akibat perkosaan, pendarahan di daerah vagina atau anus serta kehamilan yang tidak diinginkan (Sulistyaningsih, 2015)

Dampak Terhadap Mental menurut WHO, korban kekerasan seksual sangat berdampak pada kesehatan psikologis korban. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tateki, 2017) bahwa kekerasan seksual akan mempengaruhi emosi anak hingga tidak stabil, ketakutan, kecemasan, hingga depresi. Tidak menutup kemungkinan, anak dengan korban kekerasan seksual akan mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang ditandai dengan gejala, yaitu keinginan untuk bunuh diri, peningkatan kecemasan, gelisah, kekhawatiran terhadap masa depan, bahkan kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan (Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie et al, 2000).

Dampak Terhadap Sosial, ketika terjadi hal yang tidak wajar pada seseorang maka akan muncul pandangan buruk dari masyarakat sekitar. Stigma buruk yang dialami anak korban kekerasan seksual pada anak adalah berpikiran bahwa korban aalah

seorang individu yang hina. Banyak masyarakat yang bahkan memberi label bahwa kekerasan yang diterima korban adalah kesalahan yang korban perbuat. Padahal jelas disini, bahwa pelaku lah yang salah. Pandangan dan *labelling* macam itu membuat korban semakin takut untuk mengungkapkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman – temannya. Korban pun menjadi individu yang tertutup dan sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya terutama untuk melakukan hubungan dengan teman sebaya. Kondisi tersebut dapat terjadi sebab tak jarang anak korban kekerasan seksual dikucilkan dari lingkungan sosialnya (Noviana, 2015).

Korban kekerasan seksual cenderung akan mengalami disfungsi sosial. Peran sosial seorang individu dalam melaksanakan tugas kehidupannya sangat erat kaitannya dengan keberfungsian sosial. Apabila seseorang mampu melaksanakan peran sosialnya dengan baik maka individu tersebut dapat dikatakan berfungsi secara sosialnya. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak dapat melaksanakan peran sosialnya secara baik maka individu tersebut dapat dikatakan disfungsi sosial atau tidak berfungsi secara sosial.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, anak korban kekerasan seksual cenderung mengalami disfungsi sosial akibat trauma yang dialaminya. Hal ini mempengaruhi kehidupan anak pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan penanganan khusus dan menyeluruh berupa rehabilitasi psikologis

korban dan bantuan hukum. Perlu dilakukan bantuan pertolongan oleh kelompok lembaga yang efektif bagi korban untuk mengembalikan keberfungsian sosial korban dari keterpurukan dan memulihkan kondisi mentalnya dari trauma mendalam. Penanganan pada anak korban kekerasan seksual ini perlu dilakukan integrasi sosial antara masyarakat dan instansi pemerintah yang ada pada bidangnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pelayanan terpadu yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban kekerasan seksual.

Dalam memenuhi kebutuhan dan keberfungsian sosial dibutuhkan suatu pelayanan. (Moenir, 1992) menyebutkan bahwa pelayanan sosial adalah sebuah pelayanan yang mana didalamnya terdapat proses pemenuhan kebutuhan dan keberfungsian sosial. Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya (Muhidin, 1992).

Pelayanan sosial sendiri merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang ditunjukan untuk memberikan kemampuan kepada perorangan, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, dan kesatuan-kesatuan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang selalu mengalami perubahan. Pokok pemikiran dari definisi tersebut adalah (1) adanya sekumpulan kegiatan yang terorganisasi dan (2) kemampuan orang (individu maupun kolektif) dalam mengatasi masalah (Wijayanti, 2009). Walter A. Fredlander (1961) mendefinisikan pelayanan sosial sebagai suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, sosial untuk membantu perorangan dan kelompok agar dapat

mencapai standar kehidupan yang memuaskan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masyarakat. Definisi Fredlander ini sudah memasukkan unsur lembaga sosial sebagai bagian dalam pelayanan sosial, standar kehidupan serta hubungan sosial.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau lebih dikenal dengan sebutan P2TP2A hadir untuk korban melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu sebagai sebuah lembaga pelayanan masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perempuan dan anak. P2TP2A diamanahi untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak korban yang ada di wilayah Indonesia dan luar negeri dengan memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjelaskan bahwa P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang perlindungan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu

(PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulih trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah atau bentuk lainnya.

Terdapat penanganan yang telah dilakukan oleh lembaga P2TP2A untuk korban kekerasan seksual dalam mengembalikan fungsi sosialnya. Bentuk pelayanan sosial yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah dilakukannya Rehabilitasi Sosial.

Menurut Ensiklopedia Pekerjaan Sosial Indonesia (2004), rehabilitasi sosial adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa diri, keluarga dan masyarakat sekitar sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut UU No. 11 tahun 2009, rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Bentuk rehabilitasi sosial ini meliputi: (1) motivasi dan diagnosis psikososial; (2) perawatan dan pengasuhan; (3) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; (4) bimbingan mental spiritual; (5) bimbingan fisik; (6) bimbingan sosial dan konseling psikososial; (7) pelayanan aksesibilitas; (8) bantuan dan asistensi sosial; (9) bimbingan resosialisasi; (10) bimbingan lanjut; dan atau (11) rujukan. Hal ini sejalan dengan (Hawari, 2001), bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi seseorang agar dapat kembali sehat dalam arti sehat fisik, mental, agama dan sosial. Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan agar mereka dapat kembali keberfungsian secara wajar dalam

kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah tempat kerja dan lingkungan sosialnya.

Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh lembaga pada anak korban kekerasan seksual adalah agar anak-anak korban ini dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di kehidupannya. Rehabilitasi sosial suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, psikis, mental dan sosial agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya. Sebelum terjun kembali ke masyarakat, anak korban kekerasan sosial perlu mendapatkan dukungan sosial pula. Dukungan sosial didapatkan dari hubungan sosial yang akrab (orang tua, saudara, guru, teman sebaya, lingkungan masyarakat) atau dari keberadaan individu yang membuat individu merasa diperhatikan, dinilai dan dicintai (Sarason, 1990). Dukungan sosial merupakan suatu perilaku spesifik atau umum yang dapat mengubah tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh seseorang. Sebagai salah satu metode dalam coping terhadap emosi dengan membantu menilai perasaan emosi negatif. Pengembangan dukungan sosial sangat diperlukan oleh manusia dalam menjalankan hidup bersosial. Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat bertahan hidup secara individual. Manusia selalu bergantung satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Dengan mengembangkan dukungan sosial dapat merubah kepribadian seseorang untuk memiliki rasa simpati, empati, dan kasih sayang terhadap sesama. Dukungan sosial merupakan indikator penting bahwa seseorang itu saling mencintai, disukai, dihormati dan dihargai. Bastaman (1996) mengungkapkan bahwa dukungan sosial sebagai hadirnya orang-orang tertentu yang secara pribadi memberikan nasehat,

memotivasi, mengarahkan, memberi semangat, dan menunjukkan jalan keluar ketika sedang mengalami masalah dan pada saat mengalami kendala dalam melakukan kegiatan secara terarah untuk mencapai tujuan.

Dukungan sosial salah satunya dilakukan oleh lembaga P2TP2A melalui program rehabilitasi sosial yang dilakukannya. P2TP2A mengeluarkan tiga layanan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial. Proses pelayanan tersebut adalah:

1. Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus.
2. Melakukan konseling.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban.
4. Membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial.
5. Melakukan pemantauan sekurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya.

P2TP2A tidak hanya melakukan konseling psikologis terhadap korban saja tetapi juga kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam kasus anak, baik anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku sama-sama harus dilakukan konseling psikologis. Karena anak yang menjadi pelaku masih dianggap juga sebagai korban dalam suatu kasus, dan penting untuk melakukan konseling psikologis agar anak yang menjadi pelaku tersebut tidak menjadi seorang predator yang kerap mengulang perbuatannya. Terdapat beberapa tahapan dari pelayanan rehabilitasi sosial ini, yaitu berupa:

1. Tahapan Reintegrasi Sosial Merupakan proses penyiapan anak, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam

lingkungan keluarga dan masyarakat. Tahapan ini bermaksud untuk membiasakan anak untuk kembali dan menyatukan pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai. Tahapan ini sangat penting, karena tak jarang pihak-pihak yang berkonflik adalah keluarga sendiri. Misalnya seperti adanya pelaporan tentang orang tua yang kerap kali melakukan kekerasan secara verbal kepada anaknya, sehingga kondisi psikis anaknya terganggu. Tahapan reintegrasi sosial ini sangat penting untuk mengembalikan hubungan baik antara anak yang menjadi korban dan orang tuanya yang setelahnya juga telah mengakui kesalahannya. Tahapan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antara pihak-pihak yang telah berdamai.

2. Tahapan Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Tahapan pendidikan ditunjukkan kepada anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan kemudian diurus oleh P2TP2A. Pemberian pendidikan kepada anak-anak terlantar ini bertujuan untuk terus mendidik anak-anak tersebut agar perkembangan pengetahuan yang ada tidak terhenti hanya karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal.

Saat menjadi korban kekerasan seksual, disfungsi sosial yang terjadi pada anak adalah ketika anak tidak mampu menjalankan kehidupan sosialnya seperti berinteraksi dengan teman sebaya, menutup diri dari lingkungan sebaya, hingga putus sekolah. Tujuan dari pelayanan sosial yang diberikan P2TP2A dalam bentuk pelayanan sosial adalah untuk mengembalikan peran-

peran sosial anak untuk kembali pada lingkungannya dengan keadaan siap.

Mungkin pelayanan yang diberikan oleh lembaga tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti terdapat hambatan dalam prosesnya. Namun dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A ini dapat meminimalisir dampak yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual. Bukan perkara mudah untuk bangkit kembali dari keterpurukan, dengan adanya dukungan sosial dari lingkungan sosial korban tentu menjadi penguat untuk korban kembali melanjutkan kehidupannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Anak dengan korban kekerasan seksual tentunya akan mengalami rasa trauma yang mendalam. Rasa trauma yang mendalam ini akan mengganggu keseharian korban sebagai makhluk sosial. Keberfungsian yang terganggu akibat dari perlakuan pelaku pada korban tentunya perlu sebuah pelayanan dalam mengembalikan apa yang telah hilang dari korban. Keberfungsian sosial yang terganggu akan mengakibatkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi apabila individu tidak dapat melaksanakan peran sosialnya dengan baik dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Anak korban kekerasan seksual tentu saja akan mengalami hal tersebut. Namun, P2TP2A sebagai lembaga yang memiliki amanat untuk memberikan penanganan kepada korban kekerasan secara komprehensif menjadikan lembaga tersebut memiliki peran yang krusial dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Maka sebagai lembaga yang diamanahi memberikan pelayanan sosial terhadap korban, P2TP2A memiliki program rehabilitasi sosial yang dilakukan langsung oleh lembaga untuk para anak korban kekerasan seksual. Rehabilitasi yang dilakukan ini dapat mengembalikan keberfungsian sosial anak yang hilang.

Rehabilitasi ini mencakup kegiatan dan layanan penyembuhan dan pemulihan secara fisik, mental, dan sosialnya melalui pendampingan secara hukum, layanan kesehatan, konseling, dan berbagai teknik terapi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan klien. Ketika kebutuhan dasar dari anak korban kekerasan seksual sebagai korban dapat terpenuhi kembali, kehidupan akan mampu dihadapi tanpa berputus asa. Jika peran dan fungsinya dapat dijalankan dengan baik, maka hal tersebut pun dapat menjadi indikator kembalinya keberfungsian sosial korban.

Saran ini penulis sampaikan kepada pihak lembaga P2TP2A dan Anak Korban Kekerasan Seksual:

1. Untuk P2TP2A dapat lebih tanggap lagi dengan laporan yang ada dari masyarakat. Mungkin untuk kedepannya dapat melakukan pencegahan preventif yang dilakukan langsung oleh lembaga kepada anak-anak dan masyarakat lainnya berupa pengetahuan seks melalui sosialisasi dan penyuluhan. Untuk jangkauan pelayanan pun lebih luas lagi, agar korban dapat tercakup dan terpenuhi kebutuhannya.
2. Untuk anak sebagai korban kekerasan seksual, penulis mengerti bahwa tidak mudah ada di situasi sulit seperti ini. Jangan merasa takut untuk menceritakan kejadian yang dialami kepada pihak yang mampu memberikan perlindungan dan memenuhi hak korban. Jangan pula ragu untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Sebab apa yang menimpa korban itu merupakan sebuah pelanggaran HAM berat, dimana pelaku harus menerima ganjarannya berupa hukum yang setimpal. Dan jangan pernah merasa sendiri, karena sesungguhnya masih banyak orang

yang peduli dengan keberadaan kalian sebagai korban.

3. Untuk pembaca dan masyarakat luas, penulis berharap kita sebagai sesama manusia harus lebih memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jika tidak bisa memberikan solusi kepada korban, setidaknya jadilah pendengar yang baik untuk para korban kekerasan seksual tanpa melakukan pengahakiman terlebih dahulu. Karena terkadang, korban hanya butuh untuk didengar tanpa dihakimi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Friedlander, Walter. (1961). Pengantar Kesejahteraan Sosial Jakarta: Gema Insani Press,
- A.S Moenir. (1992). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Hal : 13-18
- Bastaman, H. D. (1996). Meraih hidup bermakna. Jakarta: Paramadina
- Hawari, H. (2001). Manajemen Stress, Cemas dan Depresi. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Jonathan, Sarwono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kurniawan, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21801>
- Manalu., S. N. (2006). *Dampak secara fisik, psikis, dan sosial pada anak yang mengalami child abuse (Studi kasus terhadap dua anak yang mengalami child abuse setelah ditangani oleh yayasan sahabat peduli)*. 150-155.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual

- Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13-28.
<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Sawitri Supardi Sadarjoen (2005), Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei, h. 70
- Siporin, Max (1975), Introduction to Social Work Practice, New York Macmillan Publishing. Co, Inc.
- Sulistyaningsih, E. (2015). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, 10(1), 9-23.
- Tateki, Y. T. (2017). Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77-92.
- Tower, Cynthia Crosson. (2002). Understanding Child Abuse and Neglect. Boston: Allyn & Bacon.
- Yopi Makdori. (2022, March 7). *Laporan Kemensos Sebut 780 Anak Hamil Akibat Kekerasan Sekual*. Liputan6.com; Liputan6.
<https://www.liputan6.com/news/read/4904618/laporan-kemensos-sebut-780-anak-hamil-akibat-kekerasan-sekual>
- Zastrow, Charles, 1982. Introduction Social Problem Service and Current Issues Iuiones, The Dorsey Press.